

**JÜRGEN HABERMAS DAN DEMOKRASI DELIBERATIF:
TINJAUAN KRITIS TERHADAP PRAKTIK DEMOKRASI DI
INDONESIA PASCA REFORMASI 1998**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh gelar Strata Satu
Sarjana Sosiologi

Oleh:

Moh. Yunus
NIM: 06720013

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIRA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Yunus

NIM : 06720013

Jurusan : Sosiologi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan skripsi ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya/penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota penguji.

Yogyakarta, 20 Mei 2010

Yang Menyatakan,



Moh. Yunus

NIM. 06720013



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Saudara Moh. Yunus
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Moh. Yunus
NIM : 06720013

Judul Skripsi : JÜRGEN HABERMAS DAN DEMOKRASI DELIBERATIF:
TINJAUAN KRITIS TERHADAP PRAKTIK DEMOKRASI
DI INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Jurusan/Program Studi Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Sosiologi.

Demikian ini kami sampaikan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Juni 2010

Pembimbing,

Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si
NIP: 19711212 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300; Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/750.a/2010

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Jürgen Habermas Dan Demokrasi Deliberatif: Tinjauan Kritis Terhadap Praktik Demokrasi Di Indonesia Pasca Reformasi 1998

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moh. Yunus
NIM : 06720013
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, tanggal 15 Juni 2010
Dengan nilai : A- (90) / IPK. 3,50.

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si.
NIP.19711212 199703 1 002

Penguji I

Drs. Musa, M.Si
NIP.19620912 199203 1 001

Penguji II

Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si
NIP.10761224 200604 2 001

Yogyakarta, 15 Juni 2010

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

DEKAN



Hj. Susnaningsih, M.A.
NIP.19471127 196608 2 001

MOTTO

Indahnya Hidup Jika Saling Berbagi¹

¹ Pendapat Pribadi Penulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Motivator Hidup
- Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sahabat Senasi Sehidangan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشد أن محمدا عبده ورسوله

Alhamdulillah robbil 'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia.

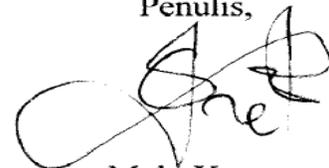
Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dra. Hj. Susilaningih, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi administratif yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi arahan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Abdullah Sumrahadi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi non administratif yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Ayahanda H. Abdul Kadir Ya'kub dan Ibunda tercinta Hj. Rohmah, yang telah memotivasi dan membimbing dalam menjalani hidup. Ba' Nining Wasi'ah dan keluarganya juga adik Taghridah dan Moh. Mansur Alfian, terima kasih banyak atas kasih sayang dan dukungan yang selalu datang tatkala pikiran sedang penat karena skripsi.
7. Insan dengan inisial Hidyah dan Mutiara, terima kasih untuk setiap pengertian dan dukunganmu selama ini.
8. Teman-teman kelas Sosiologi '06, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua bantuannya dan diskusi hangat selama ini. Insya Allah perjalanan kita selama kuliah akan menjadi kenangan terindah di diri kita maupun di FISHUM.
9. Teman-teman KORDISKA Korp DATAR serta seluruh Warga KORDISKA yang telah memberikan arti persaudaraan.
10. Teman-teman kos 33B, yang selalu memberikan kesegaran dan semangat terus berkarya dengan banyak membaca fenomena sosial terbaru untuk didiskusikan.
11. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah SWT. Serta mendapat limpahan rahmat dan karuniaNya, amin.

Yogyakarta, 20 Mei 2010

Penulis,



Moh. Yunus
NIM. 06720013

ABSTRAK

Moh. Yunus. NIM: 06720013. Jürgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif (Tinjauan Kritis Terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi 1998). Skripsi. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010.

Demokrasi adalah sebuah konsep sistem pemerintahan yang di dalamnya lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan golongan. Secara bahasa, demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos* artinya rakyat, *kratos*/kratian artinya pemerintahan atau lebih konkritnya pemerintahan yang ada di tangan rakyat. Apa yang ditawarkan oleh konseptor demokrasi sejak jaman Yunani kuno sangat menggiurkan untuk bisa dipraktikkan dalam pemerintahan di sebuah negara, betapa tidak demikian karena demokrasi dinilai sebagai satu sistem pemerintahan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi setiap bangsa dalam bernegara.

Praktik demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 1998 tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis. Kondisi politik yang demikian berubah ketika reformasi 1998 melanda bangsa Indonesia, dan dari reformasi 1998 tersebut rakyat memiliki harapan baru untuk meraih kondisi demokratisasi yang lebih cerah. Namun hingga sepuluh tahun lebih reformasi berjalan, rakyat Indonesia masih belum menemukan kejelasan dari arah demokrasi Indonesia ke depan, meski ruang publik sudah terbuka lebar akan tetapi di sana-sini banyak terjadi pelanggaran hukum. Jika demikian di manakah kedaulatan rakyat berada?

Dari latar belakang di atas, penelitian ini mencoba untuk meneliti Praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 dengan memakai konsep demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Selain itu, penelitian ini ingin mengungkap fenomena demokratisasi di Indonesia pasca reformasi yang memiliki berbagai ketimpangan dan jauh dari jalur demokrasi yang ada serta konsep negara menurut kitab suci mayoritas bangsa Indonesia yaitu al-Qur'an.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Reseach*), yaitu sumber primernya diambil dari semua bentuk karya-karya Jürgen Habermas dan sumber sekundernya diambil dari karya-karya orang yang memuat tentang demokrasi, komunikasi politik dan ruang publik serta legitimasi hukum dan kekuasaan. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada teknik *deep structur hermeunetic* dengan dasar pemikiran abduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 masih sangat jauh dari harapan demokratisasi sebagaimana mestinya, padahal pasca reformasi 1998 arah dan kebijakan berpolitik telah berubah secara drastis, bahkan ruang publik yang pada era Orde Baru tertutup dan sekarang terbuka selebar-lebarnya. Praktik demokrasi yang demikian tak lain karena para pemimpin kita dalam memimpin Indonesia masih terus mencari bentuk yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang plural ini. Melihat fenomena tersebut, demokrasi deliberatif Habermas mencoba untuk menjembatani antara ketidaksesuaian demokratisasi di Indonesia pasca reformasi 1998 dengan prosedural hukum yang berlaku di Indonesia karena, demokrasi deliberatif sendiri

merupakan sebuah tawaran demokrasi dari Habermas yang diharapkan mampu mengembalikan arah demokrasi ke jalan demokrasi seperti semula.

Dalam penelitian ini juga mengungkap berbagai kasus yang menurut penulis bisa menyebabkan ketumpulan hukum yang ada, karena bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri kalau kita berada di negara hukum. Selain itu juga demokrasi deliberatif merupakan tawaran yang lebih menekankan prosedural hukum dan ruang publik untuk terus mendampingi demokratisasi di sebuah. Namun, setelah penulis melakukan lebih jauh lagi, ternyata demokrasi deliberatif sendiri masih cukup diragukan keabsahannya untuk bisa menjembatani ketimpangan praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998, ini tak lain karena apa yang menjadi hasil pemikiran Habermas tersebut masih sangat berbeda dengan kondisi riil bangsa Indonesia yang pluralistik ini. Meskipun keberadaannya masih diragukan untuk bisa benar-benar dipraktikkan, akan tetapi kita harus tetap menghargai hasil pemikiran tersebut dan tetap kepada falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang mengikuti Pancasila.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pencerahan bagi regenerasi perpolitikan di Indonesia maupun masyarakat secara keseluruhan. Sehingga bangsa Indonesia lebih cepat mencapai mimpi yang telah lama didambakan untuk membawa kearah kemajuan.

Kata kunci: demokrasi, demokratisasi, reformasi 1998, demokrasi deliberatif, komunikasi, dan ruang publik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	16

BAB II BIOGRAFI INTELEKTUAL JÜRGEN HABERMAS: SEJARAH, KARYA, DAN TEORI

A. Biografi Jürgen Habermas dan perkembangan pemikirannya.....	18
B. Karya-karya Jürgen Habermas	23

C. Mazhab Frankfrut dan Teori Kritis	42
D. Habermas dan Teori Kritis Generasi Kedua.....	50
BAB III MENELUSURI KONSEP DEMOKRASI:	
SEJARAH, TEORI, MODEL, DAN PRAKSISNYA	
A. Sejarah Lahirnya Demokrasi.....	59
B. Konsep Demokrasi Perspektif Habermas.....	68
C. Konsep Demokrasi Deliberatif.....	73
D. Praktik Demokrasi di Indonesia Pasca Reformasi 1998.....	78
BAB IV PRAKTIK DEMOKRASI DI INDONESIA PASCA REFORMASI	
1998 PERSPEKTIF DEMOKRASI DELIBERATIF	
A. Napak Tilas Demokrasi di Indonesia	90
B. Negara Milik Kita (Rakyat).....	100
C. Indonesia Negara Plural dan Hukum, Persepektif Demokrasi Deliberatif.....	105
BAB V PENUTUP.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dialog tentang konsep demokrasi selama ini belum kunjung berakhir untuk diperdebatkan. Konsep tersebut akan senantiasa bergulir seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang selalu mengalami kemajuan dalam berfikir dan bertindak. Jika kita berkaca pada sejarah, yakni akhir abad 20 dan memasuki awal abad 21 adalah masa di mana perjalanan dunia dengan sejarah perkembangannya mengalami apa yang disebut *manufactured uncertainty*,¹ yakni gambaran zaman yang menggambarkan ketidakpastian.

Era ketidakpastian tersebut menghendaki manusia sebagai *kholifah fi al-ardhi* untuk melakukan perubahan secara universal yang bisa memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Perubahan yang dikehendaki oleh sebagian besar manusia yakni agar terbebas dari sistem pemerintahan otoritarianisme yang menghendaki adanya kekerasan baik fisik maupun struktural pemerintahan untuk mencapai keinginannya dan mempertahankan *status quo*-nya. Anthony Giddens mengistilahkan wacana di atas sebagai *Gelombang Demokrasi Ketiga*,² dan Tofler mentermenologikan sebagai *abad demokrasi massa*; yaitu keseimbangan antara cara-cara pencapaian kekayaan di satu pihak dan naluri

¹ I. Wibowo, 'pengantar' dalam Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. ix.

² Anthony Giddens, *ibid.*, hlm 7.

kekuasaan di lain pihak.³ Konsep demikian sangatlah membuat rakyat menjadi terbelenggu. Untuk menyejahterakan rakyat harus ada solusi, dan solusi yang baik adalah dengan menerapkan ataupun mempraktikkan sistem demokrasi, hampir seluruh negara di belahan bumi pada dasawarsa ini mempraktikkan sistem pemerintahan demokrasi.

Beragamnya *term* demokrasi mengakibatkan banyak negara mencoba mencari bentuk sistem demokrasi yang sesuai dengan kondisi kultur bangsanya untuk dipraktikkan. Rupanya penerapan sistem demokrasi yang sesuai dengan kondisi kultur bangsanya tersebut juga menular ke negara Indonesia yang berdiri sejak 17 Agustus 1945, meski dalam perjalanannya mengalami pelbagai praktik pemerintahan tidak demokratis yang disebabkan oleh kapitalisasi penguasa negeri ini. Akumulasi kapital yang menimbulkan keharusan struktural untuk mengabaikan demokrasi atau dengan kata lain hubungan antara proses ekonomi dengan kecenderungan munculnya otoriterisme.⁴

Sejak bergulir reformasi 1998, Indonesia yang saat ini mulai memasuki fase yang disebut dengan liberalisasi politik awal. Inilah fase yang ditandai oleh serba ketidakpastian dan karenanya dinamai secara teoritis oleh O'Donnell dan Schmitter kurang lebih sebagai fase 'transisi dari otoritarianisme entah menuju ke mana'.⁵

³ Alvin Tofler, *Pergeseran Kekuasaan, Pengetahuan, Kekayaan dan Kekerasan di Pengujung Abad Ke-21*, (Jakarta: Pantja Simpati, 1990), hlm. 4.

⁴ Mohtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 63.

⁵ Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hlm. 4-5.

Liberalisasi politik awal pasca reformasi 1998 ditandai antara lain oleh redefinisi hak-hak politik rakyat.⁶ Daftar hak yang mana sebelumnya begitu pendek, dalam fase ini telah memanjang secara dramatis. Setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun diberangus oleh rejim otoriter—Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun—. Sebaliknya, hampir tak ada kalangan yang peduli kepada kewajiban-kewajiban politik mereka.

Dalam kerangka ini terjadilah luapan kebebasan. Kehidupan politik warga ditandai oleh naiknya kebebasan sebagai suasana dan tuntutan umum di tengah masyarakat. Dari sini lalu memunculkan ledakan partisipasi politik. Ini merupakan konsekuensi logis pengekangan partisipasi politik yang berlebihan selama Orde Baru berkuasa. Ledakan partisipasi politik terjadi dalam bentuknya yang beragam. Pada tataran *grassroots*, ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru hara, kekerasan dan amuk massa.

Suasana politik yang penuh ketidakpastian ini perlu mendapatkan jalan keluar yang satu sisi tidak mengembalikan kepada situasi anti-demokrasi, tetapi pada sisi lain ledakan partisipasi rakyat mendapat saluran demokrasi secara sistemik. Berbagai perubahan radikal memang telah dilakukan oleh bangsa ini. Kehidupan demokrasi diwujudkan dalam bentuk kebebasan mendirikan partai politik, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, bahkan sekarang pemilihan umum kepala daerah (Pemilu KADA) dilakukan secara langsung pula. Josep Schumter menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif. Akibatnya, demokrasi hanya

⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

diwujudkan dalam pemilu. Setelah itu suara rakyat dikhianati dan ditendang.⁷ Tetapi di tengah semerbaknya aroma demokrasi, muncul berbagai pertanyaan kritis: Apakah partisipasi rakyat telah terwujud dalam konfigurasi politik *real* Indonesia? Ataukah partisipasi itu hanya menjadi komoditas politik paling laris di kalangan elit politik? Apakah memang benar telah terbentuk ruang publik (*public sphere*) untuk membentuk diskursus bersama? Ataukah yang terjadi adalah demokrasi semu (*psudeo democracy*) karena pada hakikatnya yang menentukan kebijakan dalam negeri ini melulu para elit? Lantas di mana peran rakyat yang katanya: demokrasi adalah sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat?

Berkaca pada pertanyaan kritis di atas maka penulis pun mencoba untuk mengangkat pemikiran tentang demokrasi dari seorang filsuf pengembang teori kritis juga sebagai seorang sosiolog terkemuka pada abad ini yaitu Jürgen Habermas. Demokrasi deliberative,⁸ bisa saja menjadi tolok ukur untuk menjawab berbagai persoalan tentang demokrasi.

Demokrasi deliberatif bukanlah sebuah gaya baru mengenai bentuk demokrasi yang ada, seperti: demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi sosial, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan demokrasi komunis, melainkan sebuah model

⁷ Coen Husain Pontoh, *Malapetaka Demokrasi Pasar*, (Yogyakarta: Resist Book, 2005), hlm. vii-viii.

⁸ Kata deliberatif berasal dari deliberasi berasal dari kata Latin *deliberatio* yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat—dalam kosakata teoritis Habermas—'diskursus publik'. Lihat F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto?*, dalam *Basis*, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 18. Lihat juga F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 128.

yang secara sosiologis diharapkan mampu menjelaskan dinamika komunikasi politik dalam negara hukum demokratis yang ada. Habermas memandang komunikasi yang terdapat dalam negara hukum demokratis selama ini belum dapat diwujudkan.

Begitu menyerotinya Habermas kepada wilayah demokrasi deliberatif karena bisa dibilang bahwa konsep tersebut sangat berkaitan dengan legitimasi kekuasaan yang sesuai dengan teorinya dia tentang komunikasi. Menurutnya, wacana kekuasaan adalah ruang publik (*public sphere*) dan inti perkaranya dalam demokrasi adalah:

...bagaimana mendapatkan rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat yang memungkinkan komunikasi sosial antar budaya yang berbeda; suatu rasionalitas yang sama bagi semua peserta dialog dan memang disyaratkan dalam tiap bentuk komunikasi.⁹

Habermas bertolak dari teori kritis ‘masyarakat’¹⁰ Marx Horkheimer dan Theodor W. Adorno, ia bermaksud mengembangkan gagasan sebuah teori masyarakat yang dicetuskan dengan maksud praktis. Walau pada akhirnya ia menolak beberapa aspek dari teori mereka khususnya tentang pesimisme budaya Horkheimer dan Adorno.¹¹ Dengan kata lain, bagaimana teori menjadi

⁹ Bambang Sugiharto, *Postmodern: Tantangan Bagi Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 53.

¹⁰ Teori kritis generasi pertama tak ubahnya seperti Karl Marx yang menganggap rasionalitas masyarakat disebut sebagai ‘paradigma kerja’ atau *praxis* dalam arti Marxian konsep rasionalitas mereka adalah konsep rasionalitas dalam perspektif pencerahan yang menjelaskan rasionalitas itu tak ubahnya sama dengan penguasaan alam. Di sini, rasio kritis merupakan penguasaan atas kondisi objektif yang mendeterminasi manusia seperti alam. Inilah kekeliruan fatal yang dilakukan teori kritis generasi pertama yaitu komunikasi dipahami sebagai model pekerjaan atau mengandaikan sesuatu dengan kurang ‘pas’ pada dua paham fundamental; Paradigma Historis dan Paradigma Materialis. Sehingga dipastikan nantinya akan terjadi perebutan kekuasaan dalam komunikasi.

¹¹ Menurut Horkheimer dan Adorno, usaha manusia untuk membebaskan diri dari mitos malah menjebak manusia dalam mitos lebih irasional lagi: mitos rasionalitas efisiensi pasar di mana hubungan antar manusia menjadi komoditi. Habermas sebaliknya tidak bersedia melepaskan ‘Proyek pencerahan’: meningkatkan kebebasan dengan mengajak manusia untuk berani berfikir

emansipatoris bagi masyarakat yang irasional.¹² Perihal tersebut membuktikan bahwa Habermas sangat mementingkan ‘rasionalitas dan komunikasi publik’ dalam upaya menerapkan demokrasi deliberatif untuk khalayak umum khususnya Indonesia.

Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa Habermas memang bermaksud menyusun teori komunikasi—sebagai jalan mengatasi kemacetan teori kritis para pendahulunya—dengan tujuan untuk membangun *konsensus universal bebas dominasi*, yang—menurutnya—menjadi kehendak fundamental bagi setiap hubungan sosial.¹³ Dengan demikian secara tidak langsung bisa kita lihat bersama bahwa rasio menempati hal yang cukup *urgent* untuk memberi peluang juga memanfaatkan tujuan mengurangi kecenderungan terhadap dominasi di bidang humanitas.

Dalam beberapa buku karya Habermas yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa Habermas menempatkan demokrasi dan ruang publik sebagai model komunikasi yang kritis antara para ahli dan para politikus dalam model pragmatis yang mau tak mau harus berakar pada sistem nilai rasio komunikasi dalam masyarakat karena model ini berhubungan dengan ruang publik secara komunikatif serta sifat dari model tersebut sangat ilmiah dan perlu didiskusikan dengan pertimbangan yang rasional.¹⁴

sendiri. Habermas berkarya guna menghadapi tendensi-tendensi mitologis baru dan memastikan kembali sumber daya rasionalitas yang diyakini masih dimiliki manusia. Lihat Franz Magnis Suseno, *75 Tahun Jürgen Habermas*, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hlm. 4.

¹² Julius Widianoro, *Proyek Sosio-Epistemologis Habermas* dalam majalah *Filsafat Driyarkara*, Th. XVII, No. 4. (Jakarta: STF Driyarkara, 1992), hlm. 3.

¹³ F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. xxi.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 130.

Sebagaimana telah disinggung di muka, Habermas menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui berbagai macam diskursus. Tetapi bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi legislator, maka dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk.¹⁵

Membaca alur pikiran Habermas dalam perkembangan program teori rasionalitas komunikasi bagi penulis bukan merupakan hal yang mudah. Untuk mempermudahnya, maka penulis bermaksud untuk mengkaji melalui sub tema dari grand tema yang hendak diajukan dalam penulisan skripsi ini. Kajian konsep demokrasi deliberatif secara subyektif akan sangat membantu untuk memahami gagasan demokrasi sesuai cita-cita bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bersama juga sebagai inspirasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia ke depan.

Fokus dan arah dalam penulisan ini mungkin akan menimbulkan banyak polemik di bidang politik khususnya tentang demokrasi sebagai salah satu konsep perpolitikan yang didambakan, ini dikarenakan bervariatnya konsep demokrasi yang ada di sekeliling kita di antaranya tentang teori, bentuk formal dari sistem demokrasi, dan strategi untuk mencapai demokrasi. Sementara di sisi lain sangat diperlukan sebuah pengujian terhadap kebijakan dengan cara diadakannya konsultasi publik agar tujuan demokrasi dengan dalih atas nama rakyat bisa tercapai. Ada beberapa identifikasi dan batasan masalah dalam penulisan ini

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *75 Tahun Jürgen Habermas, op.cit.*, hlm. 12-13.

supaya tidak menimbulkan banyak polemik: *Pertama*, demokrasi dalam tulisan ini bukanlah demokrasi yang menggambarkan corak sebuah institusional tempat dipraktikkannya sistem demokrasi dalam perpolitikan sebagaimana yang diajarkan dalam studi ilmu politik. Pandangan Habermas di sini hanyalah sebuah nilai yang menjadi dasar dalam komunikasi politik.

Kedua, berbagai macam sistem demokrasi yang dianut oleh masing-masing negara sekiranya sesuai dengan sosio-kultur dari bangsanya. Ini menjadikan sesuatu yang bisa menimbulkan akan terjadinya sistem pemerintahan otoritarian dengan mengatasnamakan demokrasi untuk kesejahteraan rakyatnya, padahal di dalamnya terdapat legitimasi hukum dan kekuasaan yang hanya memikirkan segelintir kelompok. *Ketiga*, konsep demokrasi deliberatif yang dicetuskan oleh Jürgen Habermas—sebagai salah satu pengikut Mazhab Kritis—adalah sebuah hasil pemikiran cemerlang yang pragmatik dan tidak bisa ditelusuri secara parsial. Oleh karena itu untuk memahaminya kita harus mengetahui secara komprehensif dari beberapa garis besar pemikiran Habermas, yaitu:

Pertama, kritik epistemologi: yaitu kritik terhadap pendekatan yang digunakan ilmu-ilmu sosial untuk melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada umumnya, kritik epistemologi tersebut biasa dinamakan sosio-epistemologis. *Kedua*, kritik dalam arti kritis terhadap *real phenomena* (fenomena nyata) yang ada di masyarakat. Artinya, kritik ini memiliki nilai material historisitas penindasan manusia dalam material produksi hidup atau juga bisa dikatakan sebagai telaah kritis terhadap fenomena tindakan manusia yang teraniaya secara turun temurun.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

Bagaimana konsepsi Habermas tentang demokrasi deliberatif dan bagaimana pengaruh terhadap negara Indonesia yang pluralis dan sedang mengembangkan sistem demokrasi pasca-reformasi 1998?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengkaji pemikiran seorang filsuf kontemporer Jerman yaitu Jürgen Habermas mengenai teori Rasionalitas Komunikasi-nya dengan fokus kajian demokrasi deliberatif.
2. Menambah kekayaan wacana intelektual tentang konsep demokrasi deliberatif menurut Jürgen Habermas secara penuh dengan harapan bisa menjadi inspirasi bagi penulis (khususnya) dan regenerasi bangsa Indonesia (pada umumnya) untuk mewujudkan cita-cita demokrasi negara Indonesia yang masih mencari bentuk ideal demi kemakmuran bangsanya.

D. Kegunaan penelitian

Dengan melihat tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Sebagai syarat memenuhi kewajiban akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Sosiologi juga untuk menambah

wacana pemikiran dalam lingkup sosial-politik dan filsafat untuk civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan masyarakat luas.

2. *Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian tentang Jürgen Habermas serta memberi sumbangan analisis yang tajam mengenai konsep tentang demokrasi deliberatif tinjauan kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998.
3. *Secara praktis*, Menumbuhkan inspirasi dan motivasi bagi penegak demokrasi di Indonesia terutama dalam rangka menelaah secara kritis dan menanamkan kembali nilai-nilai demokrasi di Indonesia yang masih dalam perkembangan agar tidak salah dalam pengaplikasiannya.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelumnya penulis mengira bahwa studi yang mengangkat tentang teori dan pemikiran Jürgen Habermas masih minim, namun setelah melihat beberapa literatur yang dimuat di berbagai media massa ternyata sudah banyak yang mengkajinya. Banyaknya karya tersebut tidak membuat penulis mundur untuk melanjutkan menulis tentang Habermas. Sejauh ini yang penulis ketahui yaitu: Pertama, studi Ali Fikri (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001) dengan tema *Konsep Demokrasi Jürgen Habermas: Telaah Kritis Atas Emansipasi Masyarakat*, kajian ini lebih melihat terhadap implikasi rasionalitas komunikasi dalam mazhab demokrasi. Kedua, penelitian Ahmad Jauhari (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004) tentang *Memahami Rasio Komunikatif Jürgen Habermas*, penelitian ini berfokuskan kepada hasil pemikiran Jürgen Habermas tentang rasio komunikatif-

nya yang merupakan pertautan dengan para pendahulunya seperti Theodor Adorno, Hockeimer, Marcuse dan yang lainnya.

Selain itu, dijelaskan juga bahwa Habermas memberikan alternatif baru pada pencerahan dengan paradigma rasio komunikatif (*communication vernunft*) yang didesain untuk mengatasi cacat modernitas yaitu paradigma rasio yang berpusat pada subyek dan paradigma yang secara sempit dimutlakkan dalam proyek-proyek modernisasi. Ketiga, ulasan Ahmad Qolyubi (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1999) dengan tema *Konsep Pengetahuan Jürgen Habermas*, lebih menfokuskan pandangan Habermas pada pembagian tiga kelompok ilmu pengetahuan: ilmu empiris-analisis (ilmu alam), ilmu historis-hermeneutis (ilmu sejarah dan penelitian teks kuno) dan ilmu tindakan (ilmu politik, ekonomi, sosiologi dan termasuk filsafat di dalamnya).

Selanjutnya, penelitian keempat, Ibrahim AF (Skripsi, Fakultas Filsafat, UGM Yogyakarta, 2000) dengan judul *Kritik Rasionalitas Modern; Studi Atas Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas*, penelitian melihat bahwa Habermas dengan tindakan komunikatif-nya mengkritik rasionalitas modern yang berpusat sebagai subjek sehingga menyebabkan manusia selalu berada dalam keadaan serba krisis. Kelima, ulasan Dwi Yulianto (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004) tentang *Kritik Terhadap Masyarakat Kapitalisme (Herbet Marcuse dan Jürgen Habermas)*, penelitian ini menfokuskan terhadap kritik pada masyarakat kapitalisme yang terperangkap dalam dunia kerja.

Sejatinya kehadiran pemikiran Habermas di Indonesia dimulai pada era 1990-an, yaitu: Pertama, F. Budi Hardiman yang memperkenalkan teori kritik

Habermas dengan bukunya *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990). Buku ini menjelaskan secara sistematis karya Habermas yang berjudul *Knowledge and Human Interests (Erkenntnis und interesse)*. Buku ini berusaha untuk menjelaskan usaha Habermas untuk menyusun sebuah teori dengan maksud praktis, selain itu buku ini juga mempertontonkan dalam masyarakat kapitalis modern ilmu pengetahuan telah melanggengkan sejarah penindasan manusia. Kedua, buku *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 1993). Buku ini merupakan telaah F. Budi Hardiman atas esai-esai Habermas yang termuat dalam *Toward a Rational Society* maupun dalam *Theory Of Communicative Action* yang mengarungi samudera pengetahuan sejak 1960-an dan 1980-an dan buku ini sangat menitikberatkan pada usaha Habermas tentang teori komunikasi.

Buku ketiga dari F. Budi Hardiman *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009). Buku ini merupakan telaah atas buah pemikiran Habermas yang melihat sistem demokrasi sekarang ini dipandang bukan sistem yang bisa mengeluarkan rakyat dari belenggu legitimasi hukum dan kekuasaan, itu dikarenakan tertutupnya akses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan hukum. Keempat, Pembahasan lain bisa dilihat dalam sub bab buku filsafat Franz Magnis Suseno *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), buku ini hendak menentanghkan aspek kritis filsafat dengan pendekatan historis yang menguraikan para filsuf sejak Hegel sampai Habermas. Seiring

dengan itu, buku kelima, karya A. Charis Zubaeir *Para Filsuf Penentu Gerak Zaman* (Yogyakarta: Kanisius, 1992) juga bisa kita baca karena di dalamnya menjelaskan tentang Habermas yang diletakkan sebagai penerus teori kritis. Banyak referensi yang bisa kita telaah tentang Habermas dan teori-teorinya yang termuat di berbagai karya ilmiah yang meliputi jurnal, artikel dan majalah filsafat sosial.

Dari berbagai karya di atas, sejauh ini masih belum ada yang menelaah secara kritis tentang konsep demokrasi di Indonesia pasca-reformasi 1998 dengan memakai pendekatan demokrasi deliberatif *ala* Jürgen Habermas. Bagaimana Habermas meletakkan demokrasi deliberatifnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia dengan bangsa yang pluralis?

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa kerangka teori yang sekiranya sesuai dengan fokus kajian penelitian ini.

Pertama, demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sangatlah menjanjikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap individu di lingkup negara. Itu karena dalam demokrasi terdapat unsur yang mendukung untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama yaitu rakyat 'bebas' berpendapat. Tentunya kebebasan berpendapat tersebut ditopangi dengan kemampuan yang memadai. Karena demokrasi berbasiskan atas kebebasan, maka teori yang pantas untuk mendukungnya adalah teori kritis karya Jürgen Habermas. Teori ini muncul setelah adanya kemacetan pada teori kritis generasi pertama Mazhab Frankfrut yang terbelenggu dengan konsepnya sendiri. *Kedua*, Istilah

demokrasi deliberatif, dimaksudkan bahwa suatu gagasan yang dipahami sebagai usaha perdebatan atau perbincangan argumentatif yang mengarah pada hakekat demokrasi yang berkonsensus rasional. Pada situasi semacam itu, para partisipan dialog diandaikan dapat mengatasi pandangan subyektifnya dan bisa memberi keyakinan secara rasional.¹⁶ Gagasan demokrasi deliberatif Jürgen Habermas itu muncul atas adanya kebijakan yang mengatasnamakan demokrasi namun hanya sebatas wacana tanpa mengarah ke praktik demokrasi sebagaimana biasanya. Padahal demokrasi dan ruang publik merupakan model komunikasi yang kritis antara para ahli dan para politikus karena model ini berhubungan dengan ruang publik secara komunitatif serta sifat dari model tersebut sangat ilmiah dan perlu didiskusikan dengan pertimbangan yang rasional. Oleh karena itu sangat pantas jika rasionalitas komunikasi dijadikan sebagai kerangka teori, karena teori tersebut dipakai oleh Habermas ketika mengkritik ahli waris Nietzsche (Heidegger, Derrida, Foucault, Bataille, Baudrillard dan seterusnya, yang masyhur dengan sebutan postmodernis).¹⁷ Yang mana dianggap sangat total dalam menjalankan kritik terhadap rasio, sehingga mengalami ambivalensi subyektivitas, di mana subyek berafiliasi dengan rasionya sendiri.

Ketiga, teori diskursus karya Jürgen Habermas akan sangat mendukung dalam penelitian dengan judul “Jürgen Habermas dan Demokrasi Deliberatif: Tinjauan Kritis Terhadap Praktik Demokrasi di Indonesia Pasca-Reformasi 1998” ini karena teori diskursus merupakan sebuah teori politik yang berpijak pada fakta

¹⁶ Ibrahim Ali Fauzi, *Jürgen Habermas: Seri Tokoh Filsafat*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 145.

¹⁷ F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 152.

pluralitas cara hidup dan orientasi nilai dalam masyarakat modern. Teori tersebut sangat relevan bagi bangsa Indonesia yang ingin mengedepankan hukum dan hak asasi manusia dalam proses demokratisasi dan reformasi.¹⁸

Ketiga teori tersebut akan sangat membantu penulis dalam menganalisis penulisan skripsi ini karena bagaimanapun juga ketiga kerangka teori tersebut merupakan pisau analisis yang sangat berkaitan dengan skripsi ini.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa metode yang sesuai dengan kajian yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian sosial dari hasil pemikiran seorang filsuf dan sosiolog kontemporer yaitu Jürgen Habermas dan jenis penelitian ini adalah penelitian literer dari hasil pemikiran seorang tokoh yang terdokumentasi menjadi teks. menyesuaikan dengan tema yang dikaji tersebut, maka model yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah *historis factual*.¹⁹ Dalam memperdalam kajian tokoh ini, maka penulis pun mencari dukungan pola kajian yang sangat bisa membantu penelitian literer ini, yaitu dengan dukungan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi: buku, majalah, jurnal, makalah, surat kabar dan sebagainya yang memuat pemikiran tokoh terkait. Untuk mengetahui bahwa penelitian merupakan penelitian sosial, maka penulis lebih

¹⁸ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 19.

¹⁹ Yaitu studi yang dalam objek penelitiannya adalah salah seorang tokoh dan dalam hal ini yang akan dikaji adalah Habermas tentang demokrasi deliberatif-nya untuk menelaah secara kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca-reformasi 1998.

mementingkan hamparan *hermeneutis*, untuk membedakan penelitian sosial dengan penelitian eksakta yang memakai gaya ‘saintis’.²⁰

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkan sumber-sumber utama yang diperoleh, sumber pendukung dan tulisan-tulisan yang membahas dan tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Data-data tersebut meliputi data primer maupun sekunder dengan cara menelaah karya yang ada kaitannya dengan Jürgen Habermas. Penelitian ini memilih kerangka kajian *deep structur hermeunetic*,²¹ yaitu dengan cara mengkaji dan memperdalam unsur teks dan konteks dalam hal ini demokrasi deliberatif sebagai telaah kritis terhadap praktik demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 yang menginterpretasikan masalah yang ada di dalam pokok pembahasan, setelah itu barulah menganalisa kajian masalah untuk memperjelas dan akhirnya diketahuilah letak posisi sesuai tidaknya hasil pemikirannya.

Penarikan logika dalam penelitian ini menggunakan penalaran abduktif yang menjelaskan secara detail tentang Habermas, dari sinilah penulis berusaha untuk menemukan secara logis hasil pemikirannya untuk kemudian disistematiskan dalam tulisan ini secara lebih bebas dan terintegrasi dengan struktur hermeneutika.

²⁰ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 6.

²¹ Merupakan sebuah dasar acuan untuk menginterpretasikan metode sosiologis yang memakai budaya psikoanalisis dalam penelitian, yang mana menginvestigasi kandungan cerita yang tersirat dalam teks, gambar bergerak (film), dan lukisan yang semuanya itu memakai alat sebab akibat oleh para peneliti dalam berbagi pengalaman. Lihat. Hans-Dieter König, “*Deep Structur Hermeunetic*” dalam Uwe Flick(Eds), *A Companion To Qualitative Research*, (London: SAGE, 2004), hlm. 313.

BAB V

PENUTUP

Perjalanan demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi 1945 sampai sekarang masih dan sedang dalam tahap pencarian, bagaimana tidak demikian, karena sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang, negara Indonesia yang dari awal mencita-citakan demokrasi sebagai sistem pemerintahan masih belum bisa direalisasikan. Fakta tersebut diakibatkan pernah berkuasanya dua rejim yang menghambat laju demokratisasi yaitu rejim Orde Lama dan rejim Orde Baru.

Tumbangnya rejim Orde Baru pada tahun 1998 yang disebut dengan Reformasi 1998 dengan diprakarsai oleh mahasiswa dan aktifis yang peduli akan penegakan supremasi hukum di negeri ini merupakan titik awal *aufklarung* terhadap demokratisasi di Indonesia yang telah dirampas dari tangan rakyat oleh penguasa negeri ini yang berkuasa selama 32 tahun. Namun sejak reformasi 1998 itu bergulir, sampai hari ini rakyat masih belum bisa meneguk madu kesejahteraan dan keadilan, padahal kalau melihat janji wakil rakyat ketika kampanye sepertinya kita akan sejahtera. Oleh karena itu, perlu kiranya kita untuk memperbanyak evaluasi dan kritik tindakan nyata yang membangun. Evaluasi dan kritik bagi penulis merupakan usaha untuk menemukan jalan terbaik dari praktik demokrasi, maka dari itu bagi penulis demokrasi adalah sebuah ijhtihad dan wacana menuju keadilan dan kebenaran.

Salah satu ijhtihad demokrasi yang bisa dihadirkan ke permukaan adalah ijhtihad demokrasi dari seorang filsuf Jerman, Habermas, tentang demokrasi deliberatif. Konsepsi demokrasi deliberatif karya Habermas ini tidaklah mudah untuk dipraktikkan mengingat bangsa Indonesia yang multikultur. Pancasila yang menjadi landasan negara saja banyak yang tidak mentaatinya, apalagi konsep kenegaraan lainnya. Oleh karena tidak salah jika dalam mempraktikkan demokrasi terdapat banyak polemik, khususnya terkait keadilan dan arti kebenaran. Ketika ijhtihad tersebut mengalami polemik, maka tidak sepatasnya *mandeg*, mungkin kemandegkan itu bisa dilakukan jika sudah ada ijhtihad dan wacana lain yang lebih baik untuk negeri kita.

Reformasi 1998 yang menjadi harapan baru sebagaimana dijelaskan di atas haruslah mencari resolusi. Bagi penulis, resolusi tersebut adalah dengan cara mewujudkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang memberi ruang bebas kepada rakyat untuk mengekspresikan kehendak politiknya melalui institusi-institusi publik di ruang publik. Dengan demikian maka antara rakyat dan negara bisa terjalin jaringan komunikasi politik sehingga memungkinkan terjadinya kontrol rakyat atas penguasa negara. Selain itu, diskusi-diskusi publik selama ini harus mendapat tempat, karena diskusi publik itu nantinya akan mempengaruhi kebijakan publik dan hukum yang dibangun oleh sistem politik.

Pada akhirnya komunikasi politik antara rakyat dan negara akan membutuhkan tawar menawar. Jika demikian ruang publik bisa terwujud, namun jika negara tidak melakukan *political wil* yang ditandai dengan sikap akomodatif dan responsif terhadap gejala demokratisasi di kalangan rakyat, maka ruang

publik tidak akan terwujud. Dan agar usaha tawar menawar melalui komunikasi tersebut terwujud, rakyat harus terus memperjuangkan terjadinya ruang publik itu, kalau perlu dengan merebutnya. Namun perlu diketahui perebutan ruang publik ini adalah salah satu agenda demokratisasi jangka pendek atau setidaknya menengah karena bagaimanapun juga kita sudah memiliki wakil untuk membuat kebijakan rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Maskuri, 1999. *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ambardi, Kuskridho, 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan LSI (Lembaga Survei Indonesia).
- Arikunto, Suharsini, 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Arendt, Hannah, 1958. *The Human Condition*, Chicago: The Chicaco University Press.
- Bagus, Lorens, 1996. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat* Yogyakarta: Kanisius.
- Bertens, Kees. 1983. *Filsafat Barat Abad XX; Inggris-Jerman*, Jakarta: Gramedia.
- Budiadjo, Miriam, 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 1996. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Perlemtenter dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Castles, Lance, 1999. *Partai, sebuah pengantar dalam Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999*, Yogyakarta: LKiS.
- Dahl, Robert A., 1982. *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ebestein, William, 1998 “Democracy” dalam William D. hasley and Bernand Johnton (eds), *Coller’s Eyclopedia*, New York: Macmillan Education Company.
- Eko, Sutoro, 2003. *Transisi Demokrasi Indonesia: Runtuhnya Rezim Orde Baru*, Yogyakarta: APMD Press.
- Fatah, Eep Saefulloh, 2000. *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca Orde Baru*, Bandung: Mizan.
- Fauzi, Ibrahim Ali, 2003. *Jürgen Habermas: Seri Tokoh Filsafat*, Jakarta: Teraju.

- Ghaffar, Affan, 1992. *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. (ed.), *Politik Pembangunan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Ghazali, Adeng Muchtar, 2004. *Civic Education; Pendidikan Kewarganegaraan Perpektif Islam*, Bandung: Benang Merah Press.
- Ghofur, Abdul, 2002. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi Atas Pemikiran Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: Wali Songo Press dan Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony, 1999. *The Third Way; Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 2004. *Konstitusi Masyarakat; Sketsa Teori Strukturasi*, Malang, Pedati.
- Habermas, Jürgen, 1971. *Toward A Rational Society*, London: Heinemann.
- , 1996. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Polity Press: Cambridge.
- , 1981. *Theory of Communicative Action*, Boston: Beacon.
- , 1996. *Ilmu dan Teknologi Sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES.
- , 2007. *Ruang Publik; Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- , 2007. *Theoris des Kommunikativen Handelns (Teori Tindakan Komunikatif): Reason and Rationalization of Society (Rasio dan Rasionalitas Masyarakat)*, buku satu, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- , 2007. *Theoris des Kommunikativen Handelns (Teori Tindakan Komunikatif): Lifeworld and System: a Critique of Functionalist Reason (Dunia Kehidupan dan Sistem: Kritik Atas Fungsi Rasio)*, buku dua, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hardiman, F. Budi, 1990. *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- , 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif; Ilmu, Masyarakat, Politik dan Posmodernisme Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.

- , 2004. *Demokrasi Deliberatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto?*, Majalah Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004.
- , 2009. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2010. *Dusta Dalam Politik*, dalam KOMPAS: OPINI, edisi Jum'at, 12 Februari.
- Huda, Ni'matul, 2005. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Ilyas, Hamim, 2010. *Memahami Nilai Profetik Kenabian Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Tausiyah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 H di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 24 Maret 2010.
- Jay, Martin, 2009. *Sejarah Mazhab Frankfurt: Imajinasi Dialektis Dalam Perkembangan Teori Kritis*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- , 1973. *The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and Social Research, 1923-1950*, London: Heinemann.
- J.B. Thompson (ed), 1992. *Habermas: Critical Debates*, London: The Masmillan Press.
- Juliawan, B. Hari, 2004. *Ruang Publik Habermas: Solidaritas Tanpa Intimitas*, dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember.
- Jary, David and Julia Jary, 1991. *Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow: Harper Collins Publisher.
- Kleden, Ignas, 2003. *Indonesia Setelah Lima Tahun Reformasi (Mei 1998-Mei 2003)*, dalam Analisis CSIS, Tahun XXXII/2003, No. 2.
- KOMPAS, 2010. *Semua Kecewa Pada Putusan*, edisi Jum'at 12 Februari.
- König, Hans-Dieter, 2004. "Deep Structur Hermeunetic" dalam Uwe Flick(Eds), *A Companion To Qualitative Research*, London: SAGE.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper, 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, buku satu: accelerator-Lyotard, cet. Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'oe'd, Mohtar, 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Najib, Emha Ainun, 2009. *Demokrasi La Roiba Fih*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- , 2010. *Kemana Jejak Pemikiran Dan Sejarah Hidup Guru Bangsa*. dalam Siraman Kebangsaan di Auditorium Gedung Thomas Aquinas Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 20 Mei.
- O'Donnell, Guillermo dan Philippe C. Schmitter, 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES.
- Pontoh, Coen Husain, 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar*, Yogyakarta: Resist Book.
- Rachman, M. Fadjroel, 2007. *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan*, Depok: Koekoesan.
- Rais, M. Amin, 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*, pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik, *Seri Prisma*, Jakarta: LP3ES.
- Revitch, Diane & Abigail Thernstrom (ed), 2005. *Demokrasi: Klasik & Modern*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rundell, John, "Jürgen Habermas" dalam Peter Beilharz (Ed.), 2005. *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahdan, Gregorius, 2004. *Jalan Transisi Demokrasi: Pasca Soeharto*, Bantul: Pondok Edukasi.
- Setiawan, Bambang, 2010. *Kekuasaan Pluralistik dan Arah Demokrasi*, KOMPAS bagian FOKUS PASCA-CENTURY, edisi Jum'at, 5 Maret.
- Shindunata, 1982. *Dilema Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern Oleh Horkheimer Dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. Jakarta: Gramedia.
- Sorensen, George, 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi; Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Stepan, Al fred, 1996. *Militer dan Demokrasi; Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara Lain*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiharto, Bambang, 1996. *Postmodern: Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Suharso dan Ana Retnonongsih, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Lux*, Semarang: Widya Karya.
- Sumrahadi, Abdullah, 2007. *Diam dan Mari Nikmati: Industri Budaya Sebagai Arsitek Selera Massa*, dalam *Global: Jurnal Politik Internasional* Depok:

Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Vol. 9 No. 1 Mei-November.

-----, 2005. *Kenali Potensi Terror di Dalam Diri*, sebuah pengantar, dalam Walter Laqueur, *New Terrorism: Fanatisme & Senjata Pemusnah Massal*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Sundhaussen, Uif, 1992. *Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik*. Prisma: No. 2, Th.XXI.

Suseno, Franz Magnis, 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.

-----, 2004. *75 Tahun Jürgen Habermas*, dalam Majalah Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember.

-----, 1992. *Demokrasi Sebagai Proses Pembebasan: Tinjauan Filosofis dan Historis. Dari Seminar Sehari: Agama dan Demokrasi*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) bekerjasama dengan Fredrich Nauman Stiftung (FNS).

Tofler, Alvin, 1990. *Pergeseran Kekuasaan, Pengetahuan, Kekayaan dan Kekerasan di Penghujung Abad Ke-21*, Jakarta: Pantja Simpati.

Uhlin, Anders, 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi di Indonesia*, Bandung: Mizan.

Widiantoro, Julius, 1992. *Proyek Sosio-Epistemologis Habermas*, dalam Majalah Filsafat Driyarkara, Th. XVII, No. 4. Jakarta; STF Driyarkara.

www.datastatistik-indonesia.com, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2009*, didownload tanggal 24 Mei 2010.

www.KOMPAS.com *Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau...* Kamis, 19 November 2009, didownload tanggal 24 Mei 2010.

<http://www.habermasforum.dk/index.php?type=biography>, didownload tanggal 26 Juni 2010.

<http://hendrifisnaeni.blogspot.com/2008/08/demokrasi-dan-kebahagiaan.html>. Didownload tanggal 26 Mei 2010.

<http://freesmsc.wordpress.com/2009/12/31/masa-kepemimpinan-gusdur-presiden-ri-ke-4/>. Didownload tanggal 26 Mei 2010.

<http://yogayudistira.wordpress.com/2010/05/08/analisa-politik-indonesia-pasca-reformasi/>. Didownload tanggal 26 Mei 2010.

BIODATA DIRI

Nama : Moh. Yunus
TTL : Jember 20-April-1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Dsn. Karang Semanding Rt I RwVI no.32
Sukorejo Bangsalsari Jember 68154
Alamat Email : joenoes_farhan@yahoo.co.id
No Telp : 085743746454
Motto : hidup ini terasa indah ketika bisa berbagi bersama

Pengalaman Organisasi :

- Sekretaris HIMA-SOS / BEM-P Sosiologi FISHUM UIN Sunan Kalijaga
- Ketua I KORDISKA UIN Sunan Kalijaga

Latar Belakang Pendidikan :

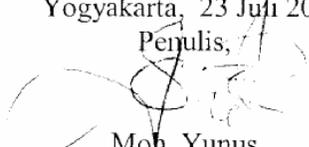
- SD : SDN Sukorejo 02 Bangsalsari Jember (1992-1998)
- SMP : SMP I Ibrahimy Sukorejo Situbondo (1998-2001)
- SMK : SMK Ibrahimy Sukorejo Situbondo (2001-2004)
- Perguruan Tinggi :
 - Universitas Jember (2004-2006)
 - Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2010)

Nama Orang Tua

Ayah : H. Abd. Kadir
Pekerjaan : Wiraswasta
Ibu : Hj. Rohmah
Pekerjaan : Dagang

Yogyakarta, 23 Juli 2010

Penulis,


Moh. Yunus

NIM: 06720013